

REKONSTRUKSI MAKNA HOAKS DI TENGAH ARUS INFORMASI DIGITAL

Rut Rismanta Silalahi; Vinta Sevilla

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

rut.silalahi@gmail.com

ABSTRAK

Hoaks kini menjadi *catch-all phrase* yang digunakan untuk menyebut semua hal yang dianggap bohong, mulai dari fitnah, ghibah, hasut, misinformasi, disinformasi, dan kemudian melebar hingga mencakup janji kampanye yang tidak terpenuhi, hoax yang membangun, propaganda, satir, dan lain-lain. Pemahaman hoaks yang melebar ini membingungkan masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi mana informasi yang termasuk hoaks dan mana yang bukan. Ternyata kebingungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri, juga terjadi kebingungan yang sama terhadap istilah *Fake News*. Sehingga, para akademisi dan praktisi di bidang komunikasi dan media menilai perlu adanya definisi operasional yang jelas tentang apa itu *Fake News*. Penelitian ini berupaya merespon tantangan tersebut, dalam hal ini tentang hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hoaks dimaknai oleh pemerintah, media (jurnalis), akademisi dan aktivis anti hoaks di Indonesia, untuk kemudian mencapai kesepakatan bersama tentang definisi dan indikator hoaks yang sesuai dengan konteks Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion*. Harapan peneliti adalah dengan adanya makna hoaks yang disepakati bersama, para *stakeholders* dapat menggunakannya untuk mengklasifikasikan informasi hoaks dengan lebih tepat, mengedukasi masyarakat awam tentang definisi hoaks, sehingga masyarakat bisa mengidentifikasi hoaks dengan lebih jelas dan terhindar dari tipu daya hoaks.

Kata Kunci: *fake news*, hoaks, makna, informasi digital

PENDAHULUAN

Hoaks kini bisa dibilang sudah menjadi *buzzword* (sebuah istilah yang sedang naik daun, hangat dibicarakan, dan sering disebut oleh banyak orang). Menurut Wahyudi Djafar, Deputy Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), meski hoaks sudah ada sejak dahulu kala, namun penyebarannya di Indonesia baru memperoleh momentum pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 (Bata, 2019). Menjelang pilpres 2019, hoaks semakin merajalela. Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks semakin masif karena adanya media sosial. (Bata, 2019)

Sejak tahun 2017, kata hoaks ditambahkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V yang tersedia dalam jaringan (daring). Kata hoaks dalam KBBI dikategorikan sebagai kata sifat (adjektiva) yang artinya tidak benar atau bohong dan sebagai kata benda (nomina) yang artinya berita bohong (Wahyu, 2017). Meski sudah masuk ke KBBI, namun masyarakat Indonesia ternyata punya pandangan beragam tentang hoaks. Contohnya, pada tahun 2018, Djoko Setiadi yang kala itu baru dilantik menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengatakan, “Tentu hoaks ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa Indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoaks itu hoaks membangun ya silakan saja.” (Ihsanuddin, 2018). Pernyataan ini sontak mengundang reaksi dari warga net yang mempertanyakan arti dari hoaks yang membangun. Ketika diklarifikasi oleh awak

media, Djoko Setiadi menyatakan bahwa hoaks yang membangun itu seperti mengkritik namun sifatnya konstruktif. (Ihsanuddin, 2018). Penjelasannya membuat masyarakat semakin bingung, bagaimana sebuah berita bohong bisa bersifat konstruktif.

Selain ada pemahaman tentang hoaks yang membangun, kini ada anggapan bahwa janji kampanye yang tidak terpenuhi adalah sebuah kebohongan atau hoaks. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar, yang tidak setuju bila kubu Prabowo dan Ratna Sarumpaet diberi label sebagai penyebar hoaks. Pemerintah Jokowi-JK juga dinilai sering menyampaikan hoaks karena banyak janji-janjinya yang tidak terpenuhi. Dahnil bahkan menyatakan bahwa Jokowi patut diangkat sebagai Bapak Kebohongan Nasional. (Tim Prabowo Soal Hari Antihoaks, 2018). Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. Ia mengatakan bahwa janji-janji kampanye yang tidak dipenuhi oleh Jokowi adalah sebuah kebohongan. (Maharani, 2019)

Pemahaman lain tentang hoaks adalah bahwa hoaks itu sama dengan fitnah. Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar Umat Beragama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Imam Aziz, mengatakan bahwa hoaks dalam definisi keagamaan itu namanya fitnah. (Putra, 2017). Selain disamakan dengan fitnah, hoaks juga disamakan dengan ghibah. Ini menjadi judul sebuah artikel berita koran jumat Serambi Ummah yang dipublikasi di situs berita *online* Banjarmasin Post (Hoax Sama Dengan Fitnah dan Ghibah, 2017).

Peneliti juga menemukan artikel berita lain yang memuat pernyataan dari Afwan Purwanto, seorang *trainer* dari Google News Initiative (GNI), yang menjelaskan bahwa hoaks bisa terjadi karena misinformasi atau disinformasi. Menurut Afwan, misinformasi adalah sebuah informasi yang salah, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Sementara disinformasi adalah informasi yang salah tetapi sengaja disebarkan dengan tujuan tertentu (Misinformasi Sebabkan Hoax, 2018). Kata misinformasi dan disinformasi ini dipakai oleh GNI mengacu pada kerangka konseptual yang ditawarkan oleh Hossein Derakhshan (Massachusetts Institute of Technology Media Lab) dan Claire Wardle (First Draft - sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari jurnalis, akademisi, pakar teknologi yang berupaya menjawab tantangan mengenai kepercayaan (*trust*) dan kebenaran (*truth*) di era digital). Derakhshan dan Wardle (2017), mengemukakan bahwa misinformasi dan disinformasi merupakan bagian dari kekacauan informasi (*information disorder*). Selain misinformasi dan disinformasi, ada pula yang namanya malinformasi, yaitu informasi yang benar namun digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu.

Derakhshan dan Wardle (2017) membedakan tiga jenis kekacauan informasi karena selama ini orang sering mencampuradukkan ketiganya dengan menggunakan satu istilah saja yaitu, *Fake News*. Tandoc, Lim & Ling (2018) menemukan bahwa dari 34 artikel ilmiah (terbit antara tahun 2003 – 2017) yang menggunakan istilah *Fake News*, sebenarnya membahas hal yang berbeda-beda, mulai dari berita satir (*news satire*), parodi berita (*news parody*), *fabrication*,

manipulasi (*manipulation*), iklan (*advertising*), dan propaganda. Derakhshan dan Wardle (2017) juga menjelaskan bahwa *Fake News* bahkan mulai digunakan oleh para politisi di berbagai belahan dunia untuk menggambarkan berita resmi yang tidak mereka setujui. Penggunaan istilah *Fake News* yang begitu luas dan bahkan melebar, mendorong Wardle (2017) untuk membuat alternatif istilah menjadi 7 tipe konten misinformasi dan disinformasi, antara lain: satir atau parodi (*satire or parody*), konten yang menyesatkan (*misleading content*), konten tiruan (*imposter content*), konten palsu (*fabricated content*), koneksi yang salah (*false connection*), konten yang salah konteks (*false context*), dan konten yang dimanipulasi (*manipulated content*). Meski demikian, istilah *Fake News* masih tetap lebih sering dipakai oleh masyarakat awam.

Rumitnya mendefinisikan *Fake News* sama seperti mendefinisikan hoaks di Indonesia. Jika diterjemahkan, *Fake News* berarti berita palsu. Pengertiannya kurang lebih sama dengan pengertian hoaks di Indonesia, yaitu berita bohong. Di Indonesia, istilah hoaks lebih populer digunakan daripada *Fake News*. Sama seperti *Fake News*, hoaks kini menjadi *catch-all phrase* yang digunakan untuk menyebut semua hal yang dianggap bohong, mulai dari fitnah, ghibah, hasut, misinformasi, disinformasi, dan kemudian melebar hingga mencakup janji kampanye yang tidak terpenuhi, hoax yang membangun, propaganda, satir, dan lain-lain.

Pembahasan mengenai hoaks di Indonesia bisa sangat luas. Agar lebih fokus, peneliti membatasi penelitian ini pada konstruksi makna hoaks oleh sejumlah pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jurnalis, akademisi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi (terutama tentang hoaks), dan sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) anti hoaks di Indonesia. Para pemangku kepentingan tersebut dipilih karena mereka adalah pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan upaya memerangi hoaks di Indonesia. Jika pihak-pihak ini saja memiliki pemahaman yang berbeda tentang hoaks, tentu saja akan sulit mengedukasi masyarakat tentang apa itu hoaks dan indikator apa yang digunakan untuk menentukan suatu informasi adalah hoaks atau bukan.

KAJIAN TEORITIS

Fake News dan Hoaks

Fake news atau berita palsu adalah berita/informasi yang salah yang disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan publik demi memenuhi kepentingan pribadi pembuatnya. Kepentingan ini bisa bersifat komersil, politis, ideologis, dan lain-lain. Berita palsu mencakup URL palsu, sumber palsu, atau fakta alternatif yang dapat dibuktikan salah. Sementara itu, hoaks didefinisikan sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik (Pellegrini, 2008). Eko Septiaji, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengemukakan pengertian yang senada, yaitu bahwa hoaks merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain hoaks bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoaks juga bisa diartikan sebagai

tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari hoaks yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah langkah.

Konstruksionisme Sosial

Konstruksionisme sosial menurut Galbin (2014, 82) adalah sebuah teori sosial yang meneliti tentang pembangunan pemahaman atas dunia. Konstruksionisme sosial juga merupakan sebuah perspektif yang menekankan pada cara memaknai diri dan dunia melalui hubungan/interaksi sosial. (Gergen, 2001). Gergen (2001) mengemukakan ada 4 asumsi utama dari Konstruksionisme sosial: 1) untuk semua istilah yang kita gunakan untuk memahami dunia kita dan diri kita sendiri, kemungkinan besar ada alternatif istilah yang bisa kita gunakan; 2) bahasa dan bentuk representasi lainnya memperoleh makna dari cara kita menggunakannya dalam hubungan; 3) kita membentuk masa depan kita melalui deskripsi, penjelasan dan representasi; 4) dan sangat penting bagi kebaikan kita di masa depan jika kita terus merefleksikan pemahaman kita. Dalam setiap asumsinya tersebut Gergen menentang gagasan orang-orang positivistik yang mengagungkan kebenaran dan objektifitas. Bagi orang-orang konstruksionis, tidak ada kebenaran tunggal, yang ada adalah berbagai kebenaran yang diterima atau diadopsi secara sosial.

Keunggulan dari konstruksionisme sosial adalah adanya dekonstruksi kategori dan klasifikasi yang kemudian mendorong kita untuk menerima keberagaman pandangan dan kekhasan pengalaman subjektif tiap-tiap orang (Burr, 1995). Namun, kelemahannya adalah perspektif ini tidak mampu memberikan panduan untuk memilih wacana mana yang mau didukung atau dikedepankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Patton dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif (Ahmadi, 2014), metode ini digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara ilmiah. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan gambaran pemahaman tentang hoaks dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, media, akademisi, dan aktivis anti hoaks, untuk kemudian merekonstruksi pemahaman tersebut menjadi makna yang disepakati bersama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, *Focus Group Discussion*, dan wawancara (Sugiyono, 2008). Studi dokumen dilakukan untuk menelaah literatur penelitian dan artikel-artikel tentang hoaks/*fake news*, khususnya yang berupaya untuk memperjelas definisi operasional dan indikator hoaks/*fake news*. *Focus Group Discussion* dilakukan dengan perwakilan Kominfo, jurnalis, akademisi pakar tentang hoaks/literasi media, dan aktivitas anti hoaks di Indonesia. Wawancara dilakukan kepada narasumber untuk menggali lebih dalam tentang penjelasan mereka yang tidak sempat tergali saat FGD.

HASIL PENELITIAN

Narasumber dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), aktivis, akademisi dan jurnalis yang memahami hoaks sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu mengundang yang mereka dalam kegiatan *Focus Group Discussion* dan melakukan *checking* data kepada narasumber. Adapun rincian data dari narasumber adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI & JABATAN
1	HS	FOUNDER OF MASYARAKAT ANTI FITNAH (MAFINDO)
2	MMN	PEGIAT LITERASI
3	IG	DOSEN JURNALISTIK, UMN SCIENTIA GARDEN
4	SI	DOSEN ILMU KOMUNIKASI, FIKOM UNISBA
5	AA	ANGGOTA INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALIST (ICFJ)
6	ANS	JURNALIS BERITA SATU
7	D	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pengertian Hoaks

Pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti adalah bagaimana hoaks dimaknai oleh pemerintah (Kominfo), jurnalis, akademisi dan aktivis literasi (anti hoaks di Indonesia). Sesuai dengan asumsi utama dari konstruksionisme sosial, bahwa dari setiap kata yang kita gunakan untuk memahami sesuatu, maka kemungkinan besar ada alternatif kata lain yang dapat digunakan. Alternatif kata tersebut muncul dari interaksi sosial setiap penggunaannya dengan sumber-sumber acuan yang mereka pakai/ akses. Peneliti melihat hal ini juga terjadi pada istilah hoaks.

Di Indonesia, kata hoaks (sebagai terjemahan dari *hoax*) lebih banyak digunakan masyarakat karena media, jurnalis, dan aktivitis juga menggunakannya. Menurut ANS (jurnalis), definisi hoaks yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidaklah tepat. Hoaks didefinisikan sebagai berita bohong, padahal berita seharusnya tidak boleh bohong. Hal ini didukung oleh IG (akademisi) yang mengacu pada laporan dari UNESCO yang menyatakan bahwa *fake news* tidak tepat lagi untuk digunakan.

“Saya sendiri secara akademis istilah fake news dan hoax akan saya hindari, saya kira lebih tepat jika berbicara tentang misinformasi, disinformasi, malinformasi rujukan saya sebenarnya UNESCO yang sudah mengeluarkan buku terkait soal materi training tentang misinformasi, di situ dikatakan mengapa mereka tidak menggunakan istilah hoax ataupun fake news” (IG)

SI (akademisi) menjelaskan bahwa di kalangan akademisi sendiri belum ada kesepakatan tentang definisi hoaks. Ada yang mengatakan bahwa hoaks itu adalah produk dari misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ada juga yang menulis sebaliknya, yaitu bahwa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi adalah produk dari hoaks. Supaya tidak bingung, maka SI mengambil pemahaman sebagai berikut:

“Saya ambil jalan tengahnya aja yaitu kita bicara informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar itu dibuat seolah-olah sebagai sebuah kebenaran, dan yang ketiga adalah it is by design. By designnya itu yang paling membedakan antara misinformasi dan disinformasi.”

Dari sudut pandang pegiat literasi, MMN mengutarakan bahwa hoaks adalah kabar atau informasi yang sengaja difabrikasi, betul-betul diolah untuk menghasilkan kekacauan informasi. Penekanannya adalah pada tendensi atau intensi untuk membuat kekacauan. Tantangan yang dialami MMN dalam memberikan edukasi literasi adalah ketika masyarakat menganggap bahwa jika sebuah pesan disampaikan oleh orang-orang ternama, maka pesan tersebut pasti adalah fakta. Jadi, hoaks atau bukan itu tergantung siapa yang mengucapkan. MMN menambahkan bahwa kebingungan sering terjadi di masyarakat ketika ada informasi yang menggabungkan dua fakta atau dua kenyataan untuk menggambarkan suatu hal yang tidak tepat, untuk menimbulkan kekacauan.

“Contohnya, dua fakta tentang pembunuhan, satu gambar foto di Suria, lalu dibilang orang Islam dibunuh. Dua-duanya fakta. Ada pembunuhan di Myanmar, ada pembunuhan di Suria, lalu ada narasi yang mengatakan betapa orang Islam itu dibunuh secara membabi buta dengan korban sedemikian banyak. Ini yang sering terjadi. Dua fakta terpisah yang disatukan untuk membesarkan sebuah isu. Jadi kalau korbannya cuma satu, terasa jadi sepuluh. Korbannya oknum, serasanya umat.”

Dari sudut pandang pemerintah, D menjelaskan bahwa definisi hoaks yang digunakan oleh Kominfo adalah kabar bohong. Ketika sebuah informasi viral, maka itu akan masuk laporannya ke Kominfo. Kominfo kemudian akan mencari tahu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jadi, Kominfo tidak ambil pusing soal intensi menyebarkan informasi, tetapi lebih pada akurasi informasinya, fakta atau bukan.

Klasifikasi Hoaks

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Derakhsan dan Wardle (2017) membuat tiga kategori kekacauan informasi, yaitu misinformasi, disinformasi dan malinformasi, untuk mengganti penggunaan istilah *fake news*. Salah seorang narasumber (jurnalis – AA) yang mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Wardle menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa istilah *fake news* tidak disarankan untuk dipakai lagi adalah karena di Amerika Serikat istilah *fake news* sudah sangat dipolitisasi. *Fake news* pertama kali dicetuskan oleh Donald Trump untuk menyerang media-media *mainstream* yang tidak setuju dengan pendapatnya. Intinya, media selain Fox News akan dianggap sebagai *fake news* oleh Donald Trump.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai misinformasi, disinformasi dan malinformasi:

“Misinformasi itu ketika orang yang menyebarkannya ga tau kalau itu salah namun ia kira benar dan menyebarkannya sementara disinformasi itu kalau orang udah tau ini salah dan dia menyebarkannya untuk politik reason or ekonomi reason sementara malinformasi itu adalah ketika seseorang menyebarkan informasi yang seharusnya konsumsi privat yang dimaksudkan untuk membuat celaka seseorang” (AA)

AA menambahkan bahwa salah satu tantangan untuk memahami klasifikasi di atas adalah karena klasifikasi di atas dibuat berdasarkan intensi. Padahal kita tidak selalu bisa mengetahui dengan pasti apa intensi seseorang

menyebarkan sebuah informasi. Oleh karena itu, Derakhsan dan Wardle (2017) menerjemahkannya lagi menjadi beberapa jenis konten, yaitu: satir atau parodi (*satire or parody*), konten yang menyesatkan (*misleading content*), konten tiruan (*imposter content*), konten palsu (*fabricated content*), koneksi yang salah (*false connection*), konten yang salah konteks (*false context*), konten yang dimanipulasi (*manipulated content*).

“misinformation itu adalah yang false connection dan misleading. Disinformation itu yang konteksnya salah, lalu ada imposter content, manipulated content dan fabricated content. Malinformation itu leaks, harassment, hate speech” (AA)

HS menyampaikan bahwa ketujuh jenis konten di atas dipakai menjadi acuan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk membuat klasifikasi hoaks di grup Facebook mereka yang bernama FAFHH (Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks) dan di situs mereka, yaitu *turnbackhoax*. Menurut AA, klasifikasi di atas memudahkan para *fact-checker* di Indonesia untuk mengidentifikasi suatu informasi dengan lebih tepat. Meski demikian, media Tempo bersama tim cek fakta menggunakan kategori penilaian yang berbeda, yaitu: (1) BENAR: berdasarkan semua sumber yang ada, pernyataan ini akurat; (2) SEBAGIAN BENAR: berdasarkan semua sumber yang secara publik bisa diakses, sebagian pernyataan ini benar; (3) TIDAK TERBUKTI: berdasarkan semua bukti yang bisa diperoleh, pernyataan ini tidak bisa disimpulkan akurat atau tidak; (4) SESAT: Berdasarkan sumber yang ada, pernyataan ini menggunakan fakta dan data yang benar, namun cara penyampaian atau kesimpulannya keliru serta mengarahkan ke tafsir yang salah; (5) KELIRU: Berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak akurat.

Meskipun sudah ada kategorisasinya, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam memberikan label pada informasi yang diduga hoaks. Kominfo sendiri pernah diprotes karena tidak tepat dalam memberikan label hoaks pada sebuah informasi.

“Waktu kejadian di Palu gempa, ada pihak yang menyebarkan berita mereka memberikan bantuan, tetapi gambar yang dipakai bukan yang di Palu. Ketika kami definisikan sebagai hoaks, itu pasti ribut. Seolah-olah mereka tidak melakukan apa-apa. Betul mereka memberikan bantuan di Palu, tapi foto yang dipakai kan bukan foto di Palu. Mereka pun membela diri, media juga sering kok begitu. Kita juga pernah memberikan stempel hoaks berdasarkan pemberitaan di media. Tapi ternyata medianya salah. Mereka kan tinggal ralat. Nah, kami yang sudah kasi stempel hoaks, kami yang digugat. Jadi, kami sekarang mendasarkan pada instansi-instansi resmi saja. Baru kita berani release.” (D)

Hal ini yang membuat Kominfo menjadi semakin berhati-hati memberikan klarifikasi informasinya. Di tim cek fakta, menurut AA, ada *news room* yang sekadar menampilkan fakta dan data saja, lalu membiarkan khalayak yang memutuskan apakah sebuah informasi itu benar atau salah. Akan tetapi Tempo mengambil kebijakan redaksi yang lebih tegas, yaitu dengan memberikan kesimpulan apakah sebuah informasi benar atau salah. Tempo juga membuka pintu bagi publik untuk memberikan laporan, masukan, bahkan kritik bagi hasil kerja tim cek fakta.

“Kami ingin membuat artikel fact-check kami jelas untuk pembaca. Setia pada yang kita debunk, kita kasi penjelasan dan kesimpulannya apa. Kita kasi tahu ke mereka, oh ini benar, oh ini salah”

Penggunaan Istilah Hoaks

Dari hasil diskusi di FGD, dapat ditangkap bahwa istilah Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi serta 7 jenis konten yang dibuat oleh Derakhsan dan Wardle (2017) sudah dikenal dan digunakan oleh para narasumber. Meski demikian, para narasumber merasa bahwa istilah-istilah tersebut masih terlalu teknis dan rumit jika hendak digunakan untuk masyarakat luas, yang tingkat pemahaman dan literasinya masih rendah. Menurut salah seorang narasumber (akademisi – SI), sebaiknya hoaks tetap digunakan karena di Indonesia levelnya masih membangun kesadaran (*awareness*) tentang hoaks itu sendiri. Jadi bentuk edukasi ke publik pun perlu disesuaikan. Jika audiensnya adalah kalangan yang literasinya rendah, maka minimal mereka tahu apa itu hoaks dan apa bahayanya jika disebarkan sembarangan. Bagi audiens dengan level literasi yang lebih baik, maka istilah-istilah kekacauan informasi yang disebut di atas, bisa dipakai. Narasumber AA juga menyetujui argumen ini. Ia pernah bertanya kepada Wardle apakah kata hoaks di Indonesia masih bisa digunakan. Wardle menjawab bahwa hal itu tidak apa-apa, sepanjang masyarakat tahu bahwa informasi itu adalah sesuatu yang tidak benar.

Semua narasumber juga sepakat untuk tidak mendefinisikan hoaks sebagai berita bohong. Alasannya seperti yang telah dikemukakan oleh ANS, bahwa berita seharusnya tidak boleh bohong. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah mengganti kata berita menjadi informasi. Sehingga, definisi hoaks menjadi informasi bohong.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah di Indonesia kata hoaks masih bisa dipakai, karena kata itu yang familiar di kalangan masyarakat. Meski demikian, definisinya perlu diperbaiki, yaitu dengan mengganti kata berita bohong menjadi informasi bohong. Indikator yang dapat disepakati adalah bahwa hoaks merupakan informasi yang dibuat (*by design*) sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan situasi. Ada faktor intensi di sana yang memang cukup sulit untuk diidentifikasi oleh orang awam. Level edukasi yang berjalan masyarakat perlu dibuat berjenjang. Bagi masyarakat awam yang level literasinya masih rendah, maka tujuan edukasinya adalah meningkatkan *awareness* tentang hoaks dan bahayanya. Bagi kelompok masyarakat yang level literasinya lebih tinggi, bisa juga diajarkan tentang tiga jenis kekacauan informasi (misinformasi, disinformasi, dan malinformasi) serta 7 jenis konten yang dibuat oleh Derakhsan dan Wardle (2017).

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah mengganti definisi hoaks di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari berita bohong menjadi informasi bohong. Hoaks tidak pantas mendapat label berita, sehingga harus diturunkan nilainya menjadi sekedar informasi. Sosialisasi dan edukasi hoaks harus terus dilakukan meskipun kondisi perpolitikan tidak se'panas' waktu pemilu, karena hoaks bisa dipakai untuk membuat kekacauan dalam berbagai situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2014.
- Bata, A. (2019, Januari). Hoax di Tahun Politik. *Berita Satu*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/fokus/hoax-di-tahun-politik>
- Derakhshan, H. & Wardle, C. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making* (Council of Europe Report DGI (2017)09). Diakses dari <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>
- Galbin, Alexandra. (2014). An Introduction To Social Constructionism. Expert Projects Publishing House. Vol. 26, pp 82-92.
- Gergen, K. J. (2001). An invitation to social construction. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hoax Sama Dengan Fitnah dan Ghibah, Umat Diminta Bijak Sebar Informasi. (2017, Oktober). *Banjarmasin Post*. Diakses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/10/07/hoax-sama-dengan-fitnah-dan-ghibah-umat-diminta-bijak-sebar-informasi>
- Ihsanuddin. (2018, Januari). Kepada Badan Siber: Kalau Hoaks yang Membangun, Silakan Saja. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/03/12215331/kepala-badan-siber-kalau-hoaks-yang-membangun-silakan-saja>
- Ihsanuddin. (2018, Januari). Persilakan Hoaks yang Membangun, Ini Penjelasan Kepala Badan Siber. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/03/17033761/persilakan-hoaks-yang-membangun-ini-penjelasan-kepala-badan-siber>
- Maharani, T. (2019, Januari). PKS: Buka Janji Kampanye Jokowi, Mana Yang Sudah Dipenuhi. *Detik News*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4367961/pks-buka-janji-kampanye-jokowi-mana-yang-sudah-dipenuhi>
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif*. 1992. (Tjetjep Rohendi Rohidi, penerjemah). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Misinformasi Sebabkan Hoax, Ini Pesan Ketua PP Muhammadiyah. (2018, November). *Suara Muhammadiyah*. Diakses dari <http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/11/26/misinformasi-sebabkan-hoax-ini-pesan-ketua-pp-muhammadiyah/>
- Pellegrini, L.A. 2008. *An Argument For Criminal Hoax*. Disertasi. University of Southern California.
- Putra, L.M. (2017, Januari). NU: "Hoax" Itu Namanya Fitnah, Jelas Tidak Boleh. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/22254681/nu.hoax.itu.namanya.fitnah.jelas.tidak.boleh>

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Tim Prabowo Soal Hari Antihoaks: Jokowi Harusnya Jadi Bapak Kebohongan. (2018, Oktober). *Kumparan News*. Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/tim-prabowo-soal-hari-antihoaks-jokowi-harusnya-jadi-bapak-kebohongan-1538645184739198703>
- Wahyu, D. (2017, Februari). Kata “Hoaks” dan “Meme” Sudah Tercatat di Kamus Bahasa Indonesia. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia>
- West, E.L & Turner, L.H. 2007. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw-Hill Higher Education